



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KESESUAIAN PERDA TIBUM DENGAN IMPLEMENTASINYA  
DALAM PENERTIBAN PELACURAN JALANAN  
(STUDI KASUS PENERTIBAN PELACURAN JALANAN DI JAKARTA)**

**T E S I S**

**SUTIYONO**

**NPM : 0806438995**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM PASCASARJANA  
DEPARTEMEN KRIMINOLOGI  
PROGRAM MAGISTER KRIMINOLOGI  
DEPOK  
JULI 2010**

## **PERNYATAAN ORSINILITAS**

Tesis ini adalah hasil karya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya tulis dengan benar

Nama : Sutiyono  
N P M : 0806438995

Tanda Tangan :

Tanggal : 5 Juli 2010

## LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Sutiyono  
NPM : 0806438995  
Program Studi : Kriminologi  
Judul Tesis : Kesesuaian Perda Tibum Dengan Implementasinya  
Dalam Penertiban Pelacuran Jalanan  
(Studi Kasus Penertiban Pelacuran Jalanan di Jakarta)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Sosial pada Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

## DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang:  
Prof. Adrianus Meliala, Ph.D :

Pembimbing:  
Dr. Mohammad Kemal Dermawan, M.Si :

Penguji Ahli:  
Prof. Dr. Bambang Widodo Umar, SIK, M.Si :

Sekretaris Sidang:  
Dra. Ni Made Martini Puteri, M.Si :

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 5 Juli 2010

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat-Nya, saya bisa menyelesaikan tesis ini. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Jurusan Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak, baik saat perkuliahan sampai dengan penyusunan tesis, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tugas ini, Karena itu, sudah sepatutnya saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Mohammad Kemal Dermawan, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah bersusah payah dan menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan dalam penulisan tesis ini.
2. Dewan Penguji yang terdiri dari Bapak Prof. Adrianus, Ph.D (Ketua Sidang), Bapak Dr Mohammad Kemal Dermawan M.Si (Pembimbing), Bapak Prof. Dr. Bambang Widodo Umar, SIK, M.Si, (Penguji Ahli), dan Ibu Dra. Ni Made Martini Puteri, M.Si (Sekretaris Sidang)
3. Seluruh rekan-rekan kerja di POSKOTA yang telah memberikan dorongan dan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
4. Pihak Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang diperlukan demi penyusunan tesis ini.
5. Pihak Satpol PP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan meskipun saat itu sedang dililit persoalan Mbah Priok, Jakarta Utara
6. Para nara sumber lain seperti Tatang Suyanto, Lukman Syahrul, Ruddin Akbar Lubis, Aseli Husin, Wt, Rn, Li, Mt, Anas Katilili, Adrian, dan Yulikha, yang dengan sangat terbuka dan memberikan informasi dan keterangan yang diperlukan dalam penyusunan tesis ini
7. Seluruh dosen Program Pascasarjana Kriminologi FISIP Universitas Indonesia yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan menularkan ilmunya selama dalam perkuliahan.

8. Rekan-rekan mahasiswa S2 Kriminologi FISIP Universitas Indonesia seangkatan yang selalu mau berdiskusi demi kelancaran penyusunan tesis ini.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini, yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas setimpal terhadap segala kebaikan dan kemakmuran hati semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan. Saya berharap semoga tesis ini bisa membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang kriminologi.

Depok, 5 Juli 2010

Penulis

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sutiyono  
NPM : 0806438995  
Program Studi : Kriminologi  
Departemen : Kriminologi  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif** (*Non - Exclusive Royalty - Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8/2007  
TENTANG KETERTIBAN UMUM DI JAKARTA  
TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Beserta perangkat yang ada ( bila diperlukan ). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia / Formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data ( *database* ), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 5 Juli 2010  
Yang menyatakan,

Sutiyono

## ABSTRAK

Nama : Sutyono  
Program Studi : Kriminologi  
Judul : Keseuaian Perda Tibum Dengan Implementasinya  
Dalam Penertiban Pelacuran Jalanan  
(Studi Kasus Penertiban Pelacuran Jalanan di Jakarta)

Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini seputar keseuaian Perda Tibum dengan implementasinya dalam penertiban pelacuran di Jakarta oleh aparat terkait dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang cenderung diskriminasi atau merugikan perempuan.

Atas permasalahan tersebut yang ingin diketahui yakni: Bagaimana pelaksanaan Perda Tibum di Jakarta terhadap pelacur jalanan yang cenderung diskriminasi atau merugikan perempuan?, Bagaimana kesesuaian antara Perda Tibum dengan implementasi Perda Tibum tersebut di lapangan?, dan Faktor-faktor apakah yang menyebabkan implementasi Perda Tibum di Jakarta saat penertiban pelacuran jalanan, cenderung diskriminasi atau merugikan perempuan.

Teori yang digunakan untuk menjelaskan alur pikir dalam tesis ini adalah teori yang berspektif feminis yang sangat erat kaitannya dengan tema yang diangkat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, karena dengan metode penelitian tersebut dapat memberikan gambaran lebih jelas dan memperoleh informasi yang seluas-luasnya seputar keseuaian Perda Tibum dengan implementasinya di lapangan saat menertibkan pelacuran jalanan.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa antara amanat Perda Tibum dengan implementasi di lapangan saat menertibkan pelacuran jalanan cenderung diskriminasi atau merugikan perempuan. Bila mengacu pada Perda Tibum, penertiban pelacuran jalanan tidak boleh diskriminasi, siapapun yang melanggar ketertiban umum harus ditertibkan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis memberikan saran atau rekomendasi, bahwa dalam menertibkan pelacuran jalanan seharusnya aparat harus mengacu pada amanat Perda Tibum itu sendiri. Penertiban pelacuran jalanan tidak boleh diskriminasi. Selain itu, dalam menertibkan pelacuran jalanan, seharusnya aparat tidak langsung menangkapi perempuan yang berada di jalan, tetapi harus diyakini dulu bahwa mereka adalah benar pelacur jalanan. Caranya antara lain mengubah cara menertibkan dengan pola yang sekarang ini dengan melakukan penyamaran, misalnya, aparat berpura-pura menjadi pelanggan atau pria hidung belang sehingga tidak akan terjadi salah tangkap.

Kata kunci:

Perda Tibum, implementasi, pelacuran jalanan, diskriminasi

## ABSTRACT

Name : Sutyono  
Study Program : Criminology  
Title : The suitability of Local Regulations of Public Order with Its Implementation in Ordering Street Prostitution (Case Study Ordering Street Prostitution in Jakarta)

Issue raised in this thesis is about the suitability of local regulation of public order (PERDA TIBUM) with its implementation in ordering street prostitution in Jakarta by related officials of Provincial Government of DKI Jakarta which tends to discriminate or disadvantage women.

For this issue that we want to know i.e.: how the implementation of local regulations of public order in Jakarta toward ordering street prostitution in Jakarta which tends to discriminate or disadvantage women? How the suitability between local regulations of public order and its implementation on the field? And what factors lead to the implementation of local regulations of public order in Jakarta tends to discriminate or disadvantage women.

Theory used to explain the flow of thought in this thesis is feminist theory which is closely related to the themes raised. Method used in this research is descriptive qualitative, this method can give a clearer picture and obtain broad information about the suitability of local regulation of public order with its implementation on the field when ordering street prostitution.

The result indicates that between the mandate of local regulations of public order and its implementation when ordering street prostitution is not suitable. Fact about implementation on the field when ordering street prostitution tends to discriminate or disadvantage women. When referring to local regulations of public order, ordering street prostitution should not discriminate, anyone who violates the public order should be disciplined.

Based on the result, the author provides suggestions or recommendations, that in ordering street prostitution, the officers should refer to the mandate of local regulations of public order itself. Regulating street prostitution should not be discrimination. Besides, in ordering the street prostitution, the authorities should not arrest the woman directly in the path, but it must be believed that they are true street prostitutes. Way to change ordering pattern for example, officers pretend to be customers or man masher so that there will be no one to be false arrested.

Keywords:

Local regulations of public order, implementation, street prostitution, discrimination



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN ORSINALITAS .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL, GAMBAR &amp; GRAFIK.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Permasalahan .....	1
1.2. Permasalahan .....	7
1.3. Pertanyaan Penelitian .....	11
1.4. Tujuan Penelitian .....	11
1.5. Signifikansi Penelitian .....	12
1.6. Pembabakan Penulisan .....	12
<b>2. KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
<b>2.1. Kerangka Konsep .....</b>	<b>15</b>
2.1.1. Ketertiban Umum .....	15
2.1.2. Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Umum .....	16
2.1.3. Pelacuran Sebagai Pelanggaran Ketertiban Umum .....	17
2.1.4. Implementasi Penegakkan Hukum Perda .....	19
2.1.5. Kebijakan Publik dan Kebijakan Kriminal .....	20
<b>2.2. Kerangka Teori .....</b>	<b>23</b>
2.2.1. Pelacuran dan Penegakkan Hukum .....	23

2.2.2. Penegakkan Hukum dan HAM .....	26
2.2.2.1. Prinsip-prinsip Penegakkan Hukum .....	30
2.2.2.2. Diskriminasi .....	32
2.2.2.3. Stratifikasi Gender Dalam Perspektif Ketertiban .....	38
2.2.2.4. Penegakkan Dominasi Laki-laki .....	39
2.2.2.5. Ketidaksamaan Gender Yang Terstruktur .....	40
2.2.3. Penertiban Pelacuran dan Penjaminan HAM .....	41
<b>3. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
<b>3.1. Pentahapan Penelitian .....</b>	<b>46</b>
<b>3.2. Ruang Lingkup Penelitian .....</b>	<b>48</b>
<b>3.3. Jenis dan Sumber Data .....</b>	<b>48</b>
<b>3.4. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>49</b>
<b>3.5. Informan .....</b>	<b>52</b>
<b>3.6. Teknik Pengolahan dan Analisa Data .....</b>	<b>53</b>
<b>4. PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM .....</b>	<b>55</b>
<b>4.1. Tujuan dan Dasar Hukum .....</b>	<b>55</b>
<b>4.2. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Implementasi Perda Tibum .....</b>	<b>61</b>
<b>4.3. Aparat Pelaksana Perda Tibum .....</b>	<b>64</b>
4.3.1. Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Aparat Satpol PP .....	64
4.3.2. Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Aparat Dinas Sosial .....	69
<b>4.4. Perda Tibum Tentang Pelacur Jalanan .....</b>	<b>70</b>
<b>4.5. Teknis Pelaksanaan Perda Tibum Tentang Pelacuran .....</b>	<b>71</b>
<b>5. HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>73</b>
<b>5.1. Implementasi Penertiban Pelacuran .....</b>	<b>73</b>
5.1.1. Strategi Penertiban Pelacur Jalanan .....	75
5.1.2. Obyek Penertiban Pelacur Jalanan .....	78
5.1.3. Pelaksanaan Penertiban Pelacur Jalanan .....	80
<b>5.2. Persepsi dan Penilaian Pihak Terkait .....</b>	<b>81</b>
5.2.1. Dinas Sosial Sebagai Pelaksana Perda Tibum .....	82

5.2.2. DPRD .....	84
5.2.3. Satpol PP Sebagai Penegak Perda Tibum .....	86
5.2.4. Pelacur .....	87
5.2.5. Reaksi Publik di Sekitar Area Penertiban .....	90
<b>5.3. Tindak Lanjut Penertiban Perda Tibum .....</b>	<b>92</b>
<b>6. ANALISIS DATA .....</b>	<b>95</b>
<b>6.1. Konsepsi Pelacuran Dalam Penegakkan Hukum .....</b>	<b>95</b>
<b>6.2. Diskriminasi Dalam Implementasi Perda Tibum .....</b>	<b>98</b>
<b>6.3. Pelacur Sebagai Korban Struktural .....</b>	<b>101</b>
<b>6.4. Evaluasi Perda Tibum dan Implementasinya .....</b>	<b>102</b>
<b>7. PENUTUP .....</b>	<b>106</b>
<b>7.1. Kesimpulan .....</b>	<b>106</b>
<b>7.2. Saran / Rekomendasi .....</b>	<b>109</b>

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

### TABEL

Tabel 1.	Hasil Penertiban Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (22 Agustus – 1 September 2009) .....	6
Tabel 2.	Komposisi Perolehan Kursi Partai Politik Provinsi DKI Jakarta Periode 2004-2009 .....	58
Tabel 3	Komposisi Petugas Penertiban Pelacur Jalanan .....	76

### GAMBAR

Gambar 1	Lokasi Rawan Wanita Susila .....	77
----------	----------------------------------	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1.

Perda Tibum 2007